



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASYHAR TUNISSEA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 148180

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **165.000.000**

1. Tanah Seluas 376 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 7.000.000
2. Tanah Seluas 1042 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 13.000.000
3. Tanah Seluas 2941 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 35.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/56 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **330.500.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR ` Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PICK UP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000



5. MOBIL, TOYOTA AVANZA MICRO/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT 110 CC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 164.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.797.639

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 676.947.639

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 626.947.639

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.